

# SINERGI PEMERINTAH DAERAH DAN PERGURUAN TINGGI DALAM MENGUPAYAKAN KEBIJAKAN PENGENDALIAN TEMBAKAU DI KABUPATEN JEMBER

Dewi Rokhmah<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Lecturer at Departement of Health Promotion and Behaviour Science, School of Public Health, University of Jember. **Correspondence:** Jl. Kalimantan I/93 Jember. Telp (0331-337878). Fax (0331-322995) email : dewikhoiron@yahoo.com; hp: +6281215400530.

## ABSTRACT

Jember is become the famous area which produces major tobacco of Indonesia. In 2011, there were 24.616 tobacco farmers whom spread in 24 districts of 31 districts in Jember. The land area of tobacco reached 10.009 hectares and the production amounted to 6.130 ton. Relating to the history factor, Jember local government makes tobacco leaves as one emblem image area. This has been considered as absence causes of the impact of tobacco control efforts in Jember . However, the results of a recent study said that the life quality of tobacco farmers in Jember less as it relates to aspects of the physical environment (climate) and social (trade system which is considered detrimental to the tobacco farmers) as well as the psychological aspects of the pros and cons among tobacco control policies. It takes a role from an independent side, likes college, to establish the cooperation by participating with government to creates a conducive environment that is not harmful for tobacco farmers which in related to the implementation of tobacco control policies. This study is a descriptive research with policy analysis approach, using the theory of Policy Analysis Triangle by Buse et al (2005). The results showed that the government policy in Jember Regent Decree number 188.45/243.1/012/2013 about Forum Health District in Jember years 2013-2018, may provide a positive impact on life quality life of society in Jember, including tobacco farmers. Judging from context, this policy supports the WHO FCTC global commitments stipulated in international law after 40 countries ratified it, the law number 32 of 2004 on Regional Government, law number 36 years 2009 on health, as well as some regulatory supports. In terms of content includes the government's commitment to the healthy development of the district comprising 9 orders. In a healthy district policy formation process, it was initiated by the local government cooperation forum by Jember University in the form of a dialogue, then they organizes seminars and socialization of policy in Jember Health Forum (Forjes) . While the actors which involved in policy making healthy district representatives from the government, private sector, NGOs, professional organizations and universities. District policy is to be the beginning of healthy tobacco control policies due to one order of a society that is healthy and self-contained anti-tobacco program requirements.

**Keywords :** *Local governments, university, policy, tobacco control*

## ABSTRAK

Kabupaten Jember terkenal sebagai salah satu daerah penghasil utama tembakau di Indonesia. Pada tahun 2011, terdapat 24.616 petani tembakau di tersebar di 24 kecamatan

dari 31 kecamatan di Kabupaten Jember. Sedangkan luas lahan tembakau mencapai 10.009 hektar dan produksi tembakau sebesar 6.130 ton. Berkaitan faktor sejarah, pemerintah Kabupaten Jember menjadikan daun tembakau sebagai salah satu gambar lambang daerah. Hal inilah yang selama ini dianggap sebagai penyebab tidak adanya upaya pengendalian dampak tembakau di Kabupaten Jember. Namun hasil penelitian terbaru menyebutkan bahwa kualitas hidup petani tembakau di Jember sangat kurang karena berkaitan dengan aspek lingkungan fisik (iklim) dan sosial (tata niaga yang dinilai merugikan petani tembakau) serta aspek psikologis ditengan pro dan kontra kebijakan pengendalian tembakau. Diperlukan adanya peran pihak yang independen dalam hal ini adalah perguruan tinggi untuk menjalin kerjasama dengan pemerintah dalam ikut serta menciptakan lingkungan yang kondusif yang tidak merugikan petani tembakau dalam penerapan kebijakan pengendalian tembakau. Penelitian ini merupakan penelitian diskriptif dengan pendekatan analisis kebijakan, menggunakan teori Segitiga Analisis Kebijakan oleh Buse at al (2005). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan Pemerintah kabupaten Jember dalam SK Bupati No 188.45/243.1/012/2013 Tentang Forum Kabupaten Sehat di Kabupaten Jember Tahun 2013-2018, dapat memberikan dampak yang positif bagi kualitas hidup masyarakat Jember termasuk para petani tembakau. Ditinjau dari *konteks*, kebijakan ini mendukung komitmen global dalam WHO FCTC yang ditetapkan sebagai hukum internasional setelah 40 negara meratifikasinya, Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 Tentang pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tahun 2009 tentang kesehatan, serta beberapa PP pendukung. Dari sisi *content* mencakup komitmen pemerintah dalam pembangunan kabupaten sehat yang terdiri 9 tatanan. Dalam *process* pembentukan kebijakan Kabupaten sehat ini diawali dari forum kerjasama pemerintah daerah dengan Universitas Jember dalam bentuk dialog, kemudian menyelenggarakan workshop dan mensosialisaikan kebijakan dalam Forum Jember Sehat (Forjes). Sedangkan *actor* yang terlibat dalam penyusunan kebijakan Kabupaten sehat terdiri dari unsur pemerintah, swasta, LSM, organisasi profesi dan perguruan tinggi. Kebijakan Kabupaten sehat ini menjadi awal kebijakan pengendalian tembakau karena pada salah satu tatanan kehidupan masyarakat yang sehat dan mandiri terdapat persyaratan program anti tembakau.

**Keywords : Pemerintah daerah, perguruan tinggi, kebijakan, pengendalian tembakau**

## **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara penghasil tembakau terbesar keenam setelah Cina, Brazil, India, USA dan Malawi, dengan jumlah produksi sebesar 136 ribu ton atau sekitar 1,91% dari total produksi tembakau dunia. Sementara itu, tiga provinsi yaitu Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Jawa Tengah merupakan penghasil tembakau terbesar di Indonesia, baik pada tahun 2009 maupun 2010. Pada tahun 2009, produksi tembakau ketiga provinsi tersebut mencapai 159 ribu ton atau 90% dari total produksi tembakau nasional. Sementara pada tahun 2010, produksi ketiga provinsi tersebut mencapai 118 ribu ton atau sekitar 87% dari total produksi tembakau nasional. Proporsi petani tembakau terhadap pekerja sektor pertanian tidak berubah, yaitu tetap pada angka 1,6%. Sementara itu, proporsi petani tembakau terhadap seluruh pekerja menurun dari

0,7% menjadi 0,6% (TCSC-IAKMI, 2012). Jawa Timur adalah kantong terbesar dalam produksi tembakau di Indonesia, selain rokok kretek. Sebagian tembakau diekspor, bahkan tidak terpengaruh krisis ekonomi di Eropa. Saat ini di Jawa timur terdapat 423.649 petani tembakau yang tersebar di 21 Kabupaten. Kabupaten Jember terkenal sebagai salah satu daerah penghasil utama tembakau di Indonesia. Kabupaten Jember menduduki urutan kedua setelah Kabupaten Pamekasan, dengan rincian luas lahan sebesar 13.498 hektar, dengan jumlah petani sebesar 28.423 orang dan jumlah produksi sebesar 7.235 ton (Radjab, 2013). Pada tahun 2011, terdapat 24.616 petani tembakau tersebar di 24 kecamatan dari 31 kecamatan di Kabupaten Jember. Sedangkan luas lahan tembakau mencapai 10.009 hektar dan produksi tembakau sebesar 6.130 ton (Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Jember, 2012).

Berkaitan faktor sejarah, pemerintah Kabupaten Jember menjadikan daun tembakau sebagai salah satu gambar lambang daerah. Hal inilah yang selama ini dianggap sebagai penyebab tidak adanya upaya pengendalian dampak tembakau di Kabupaten Jember. Namun hasil penelitian terbaru menyebutkan bahwa kualitas hidup petani tembakau di Jember sangat kurang karena berkaitan dengan aspek lingkungan fisik (iklim) dan sosial (tata niaga yang dinilai merugikan petani tembakau) serta aspek psikologis ditengah pro dan kontra kebijakan pengendalian tembakau (Chifdillah, 2013). Upaya pemiskinan yang terjadi diantaranya adalah harga daun tembakau ditentukan sepihak oleh gudang atau pabrik rokok (Jayadi & Abriansyah, 2012). Penelitian menurut Rokhmah (2013) menyebutkan bahwa sebagian besar petani tembakau di Kabupaten Jember berpendidikan rendah (tidak bersekolah), sudah menjadi petani tembakau lebih dari 10 tahun serta memiliki penghasilan per bulan dibawah UMR. Dari aspek lingkungan, terdapat realitas bahwa cuaca yang tidak menentu memang menjadi persoalan tersendiri bagi petani tembakau (Chamim et al, 2011). Sementara itu, akibat dari dampak penurunan pangsa pasar kretek, PT HM Sampoerna menutup dua pabrik rokok sigaret kretek tangan (SKT) di Kabupaten Lumajang dan Jember, Jawa Timur, sehingga terdapat PHK karyawan pabrik rokok kretek sebanyak 1 juta orang sejak tahun 2008 (Jawa pos, 2014).

Dari sisi Kesehatan, saat ini Kabupaten Jember juga memiliki angka penderita PPOK yang tinggi. PPOK merupakan penyakit paru kronik yang ditandai dengan hambatan aliran udara disaluran napas yang tidak sepenuhnya reversibel. Penyakit PPOK dikarakteristikan dengan adanya inflamasi bronkus di sepanjang saluran pernafasan, parenkim paru, dan sistem pembuluh darah pulmonar. Terdapat peningkatan jumlah makrofag, sel limfosit T ( terutama CD8+ ), dan neutrofil di berbagai bagian paru. Sel inflamasi yang teraktifkan ini akan melepaskan berbagai mediator inflamasi yang dapat merusak struktur paru atau memperlama inflamasi neutrofilik. Inflamasi di paru-paru

disebabkan oleh paparan partikel dan gas berbahaya yang terhirup. Asap rokok dapat memicu inflamasi dan secara langsung merusak paru-paru (Rahmatika, 2009).

Faktor resiko PPOK adalah riwayat merokok, riwayat terpajan polusi udara di lingkungan kerja, hiperaktiviti bronkus, riwayat infeksi saluran napas berulang, dan defisiensi antitripsin alfa-1. Rokok adalah faktor penyebab terpenting dalam menyebabkan PPOK. Adapun riwayat merokok dalam peningkatan penyakit PPOK, meliputi kebiasaan merokok yang masih tinggi (laki-laki di atas 15 tahun 60-70 %), pertambahan penduduk, meningkatnya usia rata-rata penduduk dari 54 tahun pada tahun 1960-an menjadi 63 tahun pada tahun 1990-an, industrialisasi, dan polusi udara terutama di kota besar, di lokasi industri, dan di pertambangan (Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI), 2003).

Data yang diperoleh dari RS Paru Kabupaten Jember tercatat jumlah kasus PPOK pada tahun 2013 yang dirawat inap sebanyak 313 kasus. Jumlah ini meningkat drastis dari tahun sebelumnya, yakni sebesar 221 kasus. Berdasarkan jumlah kasus PPOK di atas dan aktivitas merokok sebagai faktor resiko PPOK maka perlu dilakukan upaya dari pemerintah Kabupaten Jember untuk mengeluarkan kebijakan terkait pengendalian tembakau.

Dengan kondisi yang disebutkan di atas, diperlukan adanya peran pihak yang independen dalam hal ini adalah perguruan tinggi untuk menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah dalam ikut serta menciptakan lingkungan yang kondusif yang tidak merugikan petani tembakau dalam penerapan kebijakan pengendalian tembakau. Perguruan Tinggi sebagai lembaga yang mengfungsikan dosen sebagai "*science center*" akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam melaksanakan Tridharma Perguruan tinggi yang terdiri dari pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan karya ilmiah serta pengabdian kepada masyarakat (Arwildayanto, 2013 ). Maka dari itu perlu adanya kerjasama antara pemerintah daerah dengan perguruan tinggi dalam menciptakan lingkungan yang kondusif terhadap penerapan kebijakan pengendalian tembakau di Kabupaten Jember, yaitu melalui SK Bupati Jember No 188.45/243.1/012/2013 Tentang Forum Kabupaten Sehat di Kabupaten Jember Tahun 2013-2018.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian diskriptif dengan pendekatan analisis kebijakan, menggunakan teori Segitiga Analisis Kebijakan oleh Walt and Gilson (1994). Penelitian ini dilakukan pada Bulan Januari-April 2014 dengan tujuan untuk menganalisis sinergi pemerintah daerah dan perguruan tinggi dalam mengupayakan kebijakan pengendalian tembakau di kabupaten jember melalui SK Bupati Jember No 188.45/243.1/012/2013 Tentang Forum Kabupaten Sehat di

Kabupaten Jember Tahun 2013-2018 berdasarkan pendekatan teori segitiga analisis kebijakan menurut Walt and Gilson (1994), yang meliputi : *konteks, content, process* dan *actor*.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Kebijakan Pemerintah kabupaten Jember dalam SK Bupati No 188.45/243.1/012/2013**

#### **Tentang Forum Kabupaten Sehat**

Dalam RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2010 – 2015 disebutkan bahwa dalam bidang kesehatan Meningkatnya aksesibilitas pelayanan kesehatan masyarakat dilaksanakan dengan meningkatkan cakupan layanan kesehatan dasar serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya perilaku hidup sehat . Dari semua upaya untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal, sesungguhnya ditentukan oleh seberapa besar kesadaran masyarakat untuk "Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)" dalam rangka mencegah dan mengatasi masalah kesehatannya. Oleh karena itu, PHBS sudah selayaknya untuk mendapatkan prioritas dalam pembangunan ini.

Banyak kasus-kasus kesakitan bahkan kematian, akibat dari masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk ber-PHBS. Kasus-kasus demam berdarah yang setiap tahun selalu ada dan sulit untuk dituntaskan, kasus-kasus kurang gizi masih selalu dijumpai pada balita, utamanya karena PHBS masyarakat terkait keluarga sadar gizi masih rendah, kasus-kasus kematian ibu dan bayi yang sangat erat dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masih saja terjadi, diantaranya karena masih terbatasnya kemampuan masyarakat terkait sarana transportasi dalam menjangkau pelayanan kesehatan.

Isu-isu strategis lima tahun ke depan dalam pembangunan di bidang kesehatan, antara lain, tingginya angka kematian ibu dan anak, serta gizi buruk; Rendahnya kesadaran masyarakat berperilaku hidup sehat akibat terbatasnya aksesibilitas terhadap sumber air minum yang bersih dan keperluan sanitasi dasar secara konsisten; Tingginya penyebaran penyakit tropis dan penyakit serius lainnya, serta penyebaran HIV/AIDS, dan psikotropika (narkotika); Terbatasnya jumlah tenaga keperawatan dan kesehatan, serta sarana prasarana kesehatan masyarakat; Optimalisasi pemberian dan pelayanan, serta pengawasan jaminan kesehatan pada masyarakat; Dan, rendahnya pengawasan dan pengendalian terhadap makanan dan obat- obatan.

Peran Forum Jember Sehat ( FORJES) berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri & Menteri Kesehatan Nomor : 34 Tahun 2005 dan NO: 1138/MENKES/PB/VIII/2005 adalah sebagai wadah menyalurkan aspirasi bagi warga Jember untuk pembangunan Jember yang sehat, serta wadah bagi warga Jember untuk berpartisipasi dalam pembangunan Jember yang sehat. Adapun tatanan dalam Kabupaten sehat meliputi : (1) Tatanan Pemukiman, Sarana dan Prasarana Sehat ; (2)

Tatanan Industri dan Perkantoran Sehat; (3)Tatanan Kehidupan Masyarakat yang Sehat dan Mandiri; (4)Tatanan Transportasi dan Lalu lintas Sehat; (5)Tatanan Ketahanan Pangan dan Gizi; (6) Tatanan Kehidupan Sosial Sehat; (7) Tatanan Kawasan Hutan Sehat; (8)Tatanan Pariwisata Sehat; serta (9)Tatanan Pertambangan Sehat.

Dalam tatanan kehidupan masyarakat yang sehat dan mandiri terdapat indikator menyangkut upaya pengendalian tembakau yaitu pada indikator (1) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dengan meningkatnya rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (tidak merokok, aktifitas fisik setiap hari, dan gizi seimbang, serta pada indikator ke (9) tentang Program anti Tembakau yang meliputi : Adanya gerakan anti rokok, alkohol dan narkoba di masyarakat; Meningkatnya lingkungan bebas rokok di lingkungan sekolah, tempat kerja, dan tempat umum; dan Menurunnya prevalensi perokok dan penyalahgunaan obat/narkota (Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005).

Langkah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jember dalam rangka menindaklanjuti pelaksanaan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat melalui Bapedda adalah sebagai berikut :

1. Rapat Pertemuan Peningkatan Kapasitas Stakeholder tanggal 23 April 2013 pada level Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
2. Disposisi Bupati Jember tanggal 7 Mei 2013 yang menyetujui 9 tatanan sehat yang dilaksanakan dan menyetujui inisiasi pembentukan Tim Koordinasi dan Forum Jember Sehat;
3. Rapat Pertemuan Pembentukan Forum Jember Sehat tanggal 5 Juni 2013;
4. Disposisi Bupati Jember tanggal 17 Juni 2013 yang menyetujui penetapan Tim Koordinasi dan Forum Jember Sehat untuk melakukan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Kabupaten Sehat.

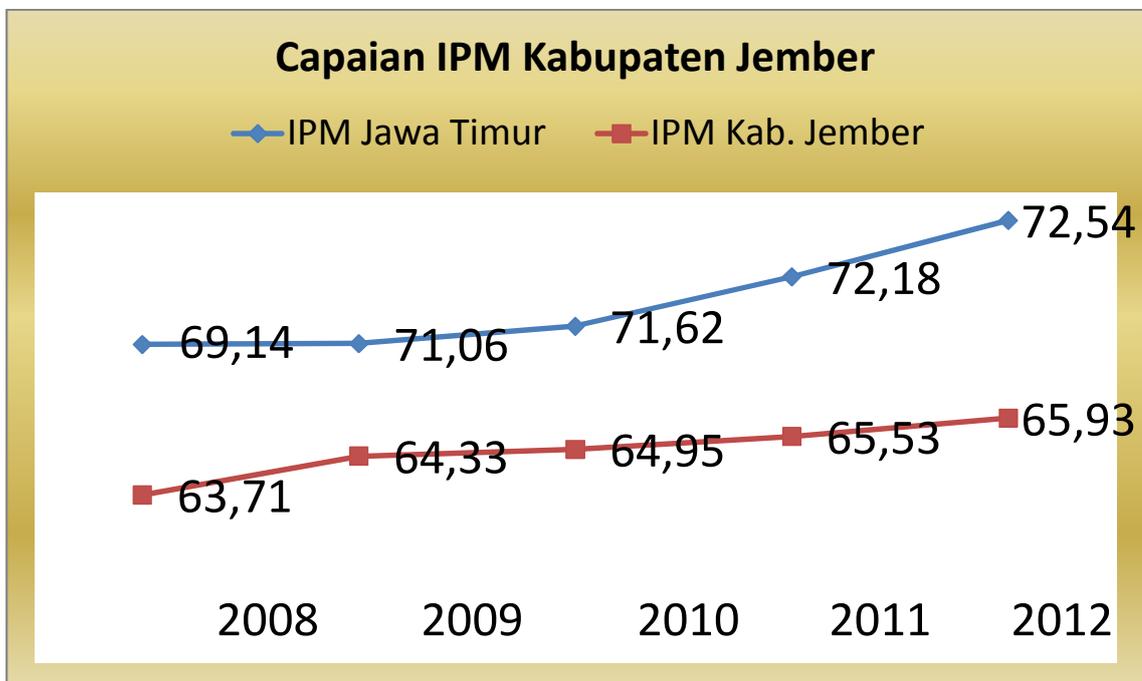
Dengan adanya komitmen pemerintah daerah bekerjasama dengan perguruan tinggi dan masyarakat yang dituangkan dalam SK Bupati Nomor 188.45/243.1/012/2013 Tentang Forum Kabupaten Sehat di Kabupaten Jember Tahun 2013-2018, melalui wadah FORJES, merupakan langkah awal dalam menegakkan kebijakan pengendalian tembakau di Kabupaten Jember. Hal ini akan berdampak pada peningkatan kualitas derajat kesehatan masyarakat yang optimal terutama dalam melindungi perempuan dan anak-anak serta masyarakat yang bukan perokok untuk terbebas dari asap rokok yang berbahaya bagi kesehatan.

## **B. Kajian Kebijakan Forum Jember Sehat berdasarkan Teori Segitiga Analisis Kebijakan**

### **1. Kajian Kebijakan Forum Jember Sehat berdasarkan indikator *konteks***

*Context* (konteks) merupakan faktor-faktor sistematis – politik, ekonomi, sosial atau budaya, baik nasional maupun internasional, yang dapat mempengaruhi kebijakan kesehatan (Buse et al, 2005). Ada banyak cara untuk mengelompokkan fakto-faktor tersebut, tetapi Leichter (1979) memaparkan terdapat 4 Faktor dalam konteks kebijakan kesehatan. Yang pertama adalah faktor situasional, merupakan kondisi yang tidak permanen atau khusus yang dapat berdampak pada kebijakan. Hal-hal tersebut sering dikenal sebagai *'focusing event'* (Buse et al, 1994). Dalam kebijakan pengendalian tembakau di Kabupaten Jember, adanya isu kesehatan dalam pengendalian tembakau yang didengungkan oleh WHO dan adanya FTCT merupakan faktor situasional yang berpengaruh besar terhadap munculnya SK Bupati Jember Nomor 188.45/243.1/012/2013 Tentang Forum Kabupaten Sehat di Kabupaten Jember Tahun 2013-2018.

Faktor yang kedua adalah faktor struktural, merupakan bagian dari masyarakat yang relatif tidak berubah. Faktor ini meliputi sistem politik, mencakup pula keterbukaan sistem tersebut dan kesempatan bagi warga masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembahasan dan keputusan kebijakan. Faktor struktural meliputi pula jenis ekonomi dan dasar untuk tenaga kerja, kondisi demografi atau kemajuan teknologi (Bust et al, 2005). Yang termasuk dalam faktor struktural adanya kebijakan pengendalian tembakau di Jember melalui SK Bupati Nomor 188.45/243.1/012/2013 Tentang Forum Kabupaten Sehat di Kabupaten Jember Tahun 2013-2018, adalah angka IPM (Indeks Pembangunan Masyarakat) seperti pada gambar berikut ini :



Dari gambar di atas dapat terlihat bahwa Kabupaten Jember termasuk 8 Kabupaten di Jawa Timur dengan IPM terendah. Salah satu pilar yang berperan dalam penentuan IPM adalah pembangunan kesehatan yang ditunjukkan dengan UHH (Umur Harapan Hidup). Kebijakan pengendalian tembakau di daerah bertujuan untuk mengurangi kesakitan dan kematian akibat rokok dan asap rokok, serta melindungi perempuan dan anak-anak serta masyarakat yang bukan perokok untuk terbebas dari asap rokok yang berbahaya bagi kesehatan. Hal ini berarti pula dapat meningkatkan UHH masyarakat Kabupaten Jember.

## **2. Kajian Kebijakan Forum Jember Sehat berdasarkan indikator *content***

*Content* (isi) dalam suatu kebijakan merupakan substansi dari suatu kebijakan yang memperinci bagian-bagian dalam kebijakan (Buse et al, 2005). Dalam SK Bupati Jember Nomor 188.45/243.1/012/2013 Tentang Forum Kabupaten Sehat di Kabupaten Jember Tahun 2013-2018, disebutkan bahwa dalam rangka mewujudkan Kabupaten Jember yang sehat, diperlukan penyelenggaraan Program Kabupaten Jember. Dimana agar program Kabupaten jember berjalan efektif, terkoordinir dan akuntabel dibentuk dan ditetapkan FORJES di Kabupaten jember Tahun 2013-2018.

Dalam SK Bupati Nomor 188.45/243.1/012/2013 Tentang Forum Kabupaten Sehat di Kabupaten Jember Tahun 2013-2018, FORJES mempunyai tugas sebagai berikut : (1) membentuk forum komunikasi Desa/Kelurahan di tingkat kecamatan dan membina kelompok kerja kecamatan/Desa Sehat atau kelompok kerja aktifitas dari stakeholder tatanan kawasan yang dipilih menjadi program; (2) Merumuskan usulan, prioritas, sasaran dan perencanaan, serta mengevaluasi perkembangan FORJES; (3) Mengupayakan pendanaan dari sumber lain seperti donatur, swasta, LSM dan pemerintah; (4) mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan Kabupaten sehat agar efektif dan efisien; (5) Bersama tim Pembina kabupaten sehat merumuskan pembangunan kabupaten sehat; (6) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugas Forum kepada Bupati melalui koordinator tim teknis Kabupaten sehat.

## **3. Kajian Kebijakan Forum Jember Sehat berdasarkan indikator *process***

Komitmen Pemerintah kabupaten Jember dengan masyarakat termasuk perguruan tinggi dalam kebijakan pengendalian tembakau diawali dengan adanya rapat pertemuan Peningkatan Kapasitas Stakeholder tanggal 23 April 2013 pada level Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kemudian hal ini ditindaklanjuti dengan adanya disposisi dari Bupati Jember tanggal 7 Mei 2013 yang menyetujui 9 tatanan sehat yang dilaksanakan dan menyetujui inisiasi pembentukan Tim Koordinasi dan Forum Jember Sehat, dan dilanjutkan pada Rapat Pertemuan Pembentukan Forum Jember Sehat tanggal 5 Juni 2013, melalui SK Bupati Nomor Nomor 188.45/243.1/012/2013

Tentang Forum Kabupaten Sehat di Kabupaten Jember Tahun 2013-2018, dengan nama Forum Jember Sehat (FORJES).

Dalam rangka melakukan sosialisasi terbentuknya FORJES beserta tugas dan tanggung jawabnya kepada masyarakat, maka diselenggarakan workshop dengan tema “**Membangun Sinergi Peran Pemerintah dan Masyarakat Menuju Jember Sehat**”. Adapun tujuan dari kegiatan workshop tersebut adalah dapat menghasilkan rumusan pembagian peran strategis dari stakeholder kesehatan masyarakat di Kabupaten Jember, yang meliputi : Mengidentifikasi masalah kesehatan dan penyebabnya; Menetapkan prioritas masalah kesehatan yang ada; Mengidentifikasi alternatif solusi dari prioritas masalah kesehatan masyarakat; Mengidentifikasi peran strategis dari masing-masing stakeholder kesehatan masyarakat; serta Mengembangkan pola komunikasi dan koordinasi dari semua stakeholder kesehatan masyarakat.

Narasumber yang dihadirkan dalam workshop berasal dari Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur dengan materi Peran lintas sektor dalam Pembangunan Kesehatan Masyarakat), Praktisi Kesehatan Masyarakat (Kabid P2PL Dinas kesehatan Kabuapten Jember) dengan materi : Analisis Potensi Daerah dalam Pembangunan Kesehatan Masyarakat), serta Tim Dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember dengan materi berjudul Analisis Derajat Kesehatan Masyarakat Jember Berbasis *Research*.

Dalam rangka menumbuhkan kesadaran pentingnya kebijakan pengendalian tembakau di kalangan stakeholder terkait, maka dalam workshop FORJES ini melibatkan peserta dari berbagai unsur masyarakat dan instansi, yaitu sejumlah 150 peserta yang terdiri dari : Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Jember (Dinas Kesehatan, BP2KB, Diknas, Badan Ketahanan Pangan, Dinsosnakertrans, Dishubinfokom, Diperta, Balitbang, Bapemas, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Bagian Humas, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Kantor Lingkungan Hidup), Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta di Kabupaten Jember, Kepala Puskesmas se-Kabupaten Jember, Dosen, Perwakilan dari unsur PKK (Ibu Bupati) serta Masyarakat Pemerhati Kesehatan.

#### **4. Kajian Kebijakan Forum Jember Sehat berdasarkan indikator *actor***

*Actor* atau pelaku dalam penyusunan sebuah kebijakan merujuk pada individu, organisasi atau bahkan negara, beserta tindakan mereka yang mempengaruhi kebijakan (Buse, 2005). Dalam proses penyusunan Kebijakan tentang Kabupaten Sehat melalui SK Bupati Nomor Nomor 188.45/243.1/012/2013 Tentang Forum Kabupaten Sehat di Kabupaten Jember Tahun 2013-2018, dengan nama Forum Jember Sehat (FORJES) ini melibatkan berbagai pihak baik dari Pemerintah daerah, masyarakat, dan perguruan tinggi. Sinergi antara Pemerintah Kabupaten Jember dengan Perguruan Tinggi dalam mengupayakan kebijakan Pengendalian Tembakau di Kabupaten Jember

diwujudkan dengan keterlibatan perguruan tinggi negeri yang besar di Kabupaten Jember yaitu Universitas Jember, Politeknik Negeri Jember dan STAIN Jember. Selain itu, sebagai ketua FORJES berasal dari Ketua Kembaga penelitian Universitas Jember.

FORJES beranggotakan dari unsur pemerintah yang terdiri dari Kepala Kantor PDAM Kabupaten Jember dan Kadinda Jember. Dari unsur masyarakat terdiri dari : GP ansor, Radar Jember, Tokoh masyarakat, serta Rumah Sakit Bina Sehat. Sedangkan organisasi profesi yang terlibat dalam FORJES berasal dari : IDI (Ikatan Dokter Indonesia), HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia), HAKLI (Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia) cabang Jember.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Kebijakan Pemerintah kabupaten Jember dalam SK Bupati No 188.45/243.1/012/2013 Tentang Forum Kabupaten Sehat di Kabupaten Jember Tahun 2013-2018, dapat memberikan dampak yang positif bagi kualitas hidup masyarakat Jember termasuk para petani tembakau. Ditinjau dari *konteks*, kebijakan ini mendukung komitmen global dalam WHO FCTC yang ditetapkan sebagai hukum internasional setelah 40 negara meratifikasinya, Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 Tentang pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tahun 2009 tentang kesehatan, serta beberapa PP pendukung. Dari sisi *content* mencakup komitmen pemerintah dalam pembangunan kabupaten sehat yang terdiri 9 tatanan. Dalam *process* pembentukan kebijakan Kabupaten sehat ini diawali dari forum kerjasama pemerintah daerah dengan Universitas Jember dalam bentuk dialog, kemudian menyelenggarakan workshop dan mensosialisaikan kebijakan dalam Forum Jember Sehat (Forjes). Sedangkan *actor* yang terlibat dalam penyusunan kebijakan Kabupaten sehat terdiri dari unsur pemerintah, swasta, LSM, organisasi profesi dan perguruan tinggi.

Kebijakan Kabupaten sehat menjadi awal kebijakan pengendalian tembakau karena pada salah satu tatanan kehidupan masyarakat yang sehat dan mandiri terdapat persyaratan program anti tembakau. Diperlukan adanya tindak lanjut dari FORJES untuk mengaplikasikan kebijakan pengendalian tembakau dalam Penyusunan Rencana induk Pengembangan kabupaten Sehat dalam bentuk Program KTR di Kabupaten Jember.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arwildayanto. 2013. *Manajemen Sumber daya manusia Perguruan Tinggi ; Pendekatan Budaya Kerja Dosen Profesional*. Bandung : Alfabeta.
- Buse, K. Mays, N. Wall, G. 2005. *Understanding Public Health : Making Health Policy*. London : Open University Press.
- Chamim, M, Dhyatmika, W. Gaban, lamuri, F. Hamzah, a. 2011. *A Giant Pack of Lies Bongkah Raksasa Kebohongan : Menyorot Kedigdayaan Industri Rokok di Indonesia*. Jakarta : KOJI Communications bekerjasama dengan TEMPO Institute.
- Chifdillah, N.A. 2013. *Kulaitas hidup petani Tembakau di kabupaten Jember*. *Skripsi*. Jember : Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember.
- Jawa Pos. 2014. *Ribuan Pabrik Rokok Gulung Tikar, Dampak Penurunan Pangsa Pasar Kretek*. Jember : Jawa Pos.
- Jayadi, A. & Abriansyah, T. 2012. *Sengsara Di Timur Jawa : Kisah Ketidakberdayaan Para Petani Tembakau Sumenep, Pamekasan dan Jember Menghadapi Tataniaga Tembakau yang Memiskinkan*. Jakarta : Yayasan Ayo Indonesia Sehat.
- Radjab, S. 2013. *Dampak Pengendalian tembakau Terhadap hak-Hak ekonomi, Sosial dan Budaya*. Bandung : Serikat Kerakyatan Indonesia (SAKTI) dan center For law and Order Studies (CLOS).
- Rahmatika, A. 2009. *Karakteristik Penderita Penyakit Paru Obstruksi Kronik yang di Rawat Inap di RSUD Aceh Tamiang tahun 2007-2008*. Medan: Universitas Sumatra Utara.
- Rokhmah, D. 2013. *Analisis Faktor Risiko Green Tobacco Sickness (GTS) Dan Metode Penanganannya Pada Petani Tembakau*. *Laporan Penelitian*. Jember : Lembaga Penelitian Universitas Jember.
- Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kresehatan Nomor 34 Tahun 2005 tentang *Pedoman Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat*. 2005. Jakarta : tim Pembina kabupaten/Kota Sehat Tingkat Pusat.
- Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, 2003. *Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK): Pedoman Diagnosis dan Penatalaksanaan di Indonesia*.
- Surat Keputusan Bupati Jember. 2013. SK Bupati Nomor 188.45/243.1/012/2013 Tentang *Forum Kabupaten Sehat di Kabupaten Jember Tahun 2013-2018*.
- TCSC-Indonesia. 2012. *Fakta Tembakau di Indonesia*. TCSC-IAKMI. Jakarta. [serial online]. <http://tcsc-indonesia.org/wpcontent/uploads/2012/08/Fact-Sheet-Fakta-Tembakau-Di-Indonesia.pdf>. [18 Mei 2013].
- TCSC-Indonesia. 2012. *Petani Tembakau di Indonesia*. TCSC-AIKMI. Jakarta. [serial online]. <http://tcsc-indonesia.org/wp-content/uploads/2012/08/Fact-Sheet-Petani-Tembakau-Di-Indonesia.pdf>. [18 Mei 2013].

